



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

Jl. 17 Agustus, Kota Manado, Teling Atas, Kecamatan  
Wanea, Kota Manado




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

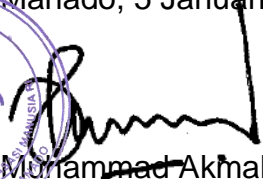
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO  
PERIODE TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjukNya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2022. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu. Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada masa mendatang. Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Manado, 5 Januari 2023



  
Muhammad Akmal  
NIP. 196908071992031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manado sebagai pengemban tugas dan fungsi keimigrasian, merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan tugas pembangunan nasional. Dengan demikian peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado juga ikut serta dalam mendukung tugas pemerintah dan tugas pembangunan, melalui penyelenggaraan pelayanan keimigrasian baik terhadap warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA), serta pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Indonesia serta pelaksanaan tugas di bagian fasilitatif dan penatausahaan. Untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta target yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 dimana setiap output kegiatan/ kinerja berbasiskan anggaran yang harus mengacu pada koridor ketentuan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih. Dimulai dengan tahapan perencanaan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban, capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada Tahun 2022 memperoleh nilai 97,27 untuk Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, dengan jumlah realisasi Rp. 12.315.126.000,- (96.21%) dari total Pagu Rp. 11.848.790.494,- Capaian ini semakin mendorong Kanim Manado untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance).

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Ikhtisar Eksekutif .....	2
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
A.          Latar Belakang .....	4
B.          Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	5
C.          Maksud dan Tujuan .....	10
D.          Aspek Strategis .....	11
E.          Isu Strategis .....	12
F.          Sistematika Laporan .....	12
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
A.          Rencana Strategis .....	13
B.          Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>17</b>
A.          Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B.          Realisasi Anggaran .....	22
C.          Capaian Kinerja Anggaran .....	23
D.          Capaian Kinerja Lainnya .....	24
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
A.          Kesimpulan .....	27
B.          Saran .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang ditujukan untuk terselenggaranya Good Governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Penyusunan LKjIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi, tujuan sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LKjIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya. Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun Anggaran 2022.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya meliputi 2 Kota dan 4 Kabupaten yaitu :

1. Kota Manado
2. Kota Tomohon
3. Kabupaten Minahasa
4. Kabupaten Minahasa Utara
5. Kabupaten Minahasa Selatan
6. Kabupaten Minahasa Tenggara

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melaksanakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program di bidang keimigrasian
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara serta rumah tangga; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado terdiri atas 1 Sub Bagian dan 4 Seksi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

<b>1. Sub Bagian Tata Usaha</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.</p> <p>a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.</p> <p>b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>2. pelaksanaan dan pengendalian internal;</li> <li>3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan</li> <li>4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.</li> </ol>

<b>2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;</li> <li>2. pelayanan paspor;</li> <li>3. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;</li> <li>4. pelayanan pas lintas batas;</li> <li>5. pemeriksaan dokumen keimigrasian;</li> </ol>

<p>paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.</p> <p>b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>6. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.</p>
--	--

<b>3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.</p> <p>b. Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;</li> <li>2. pelayanan izin tinggal;</li> <li>3. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;</li> <li>4. pelayanan izin masuk kembali;</li> <li>5. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;</li> <li>6. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan</li> <li>7. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</li> </ol>



<p>pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</p>	
--	--

<b>4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.</p> <p>b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</li> <li>2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;</li> <li>3. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</li> <li>4. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan</li> <li>5. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.</li> </ol>

<b>5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;</li> <li>2. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;</li> </ol>

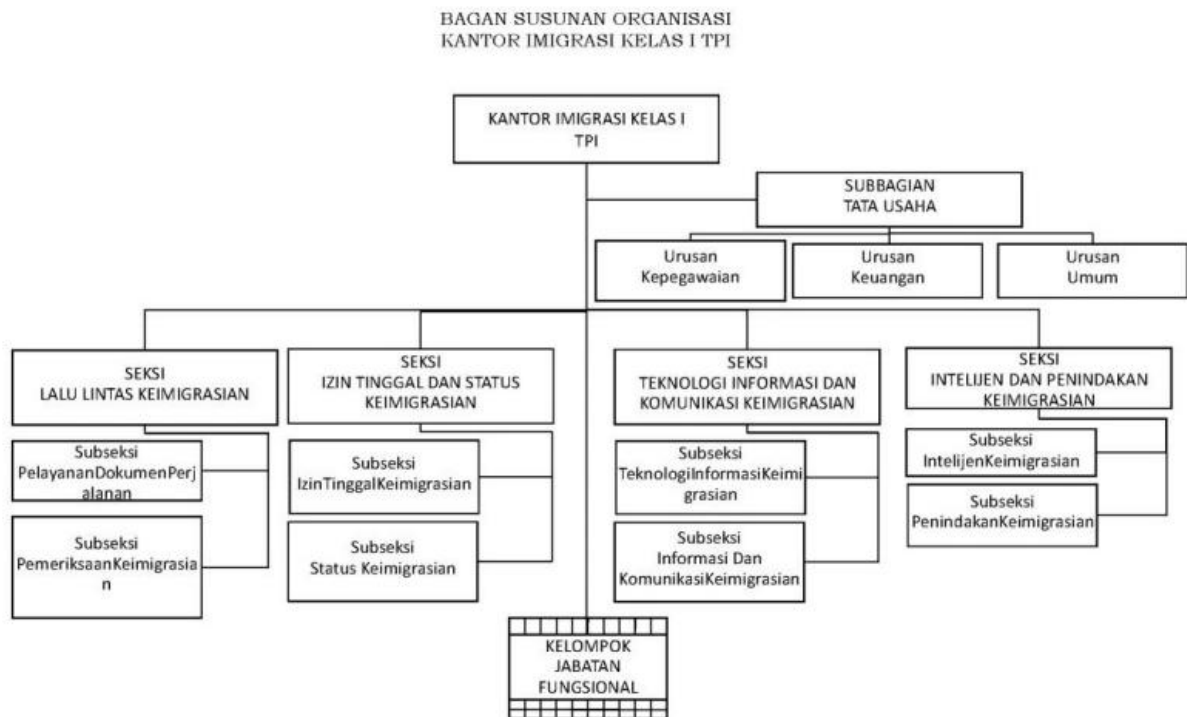
<p>a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian</p> <p>b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.</p>	<p>3. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;</p> <p>4. penyajian informasi produk intelijen;</p> <p>5. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;</p> <p>6. penyidikan tindak pidana keimigrasian;</p> <p>7. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan</p> <p>8. pelaksanaan pemulangan orang asing.</p>
--	--

Kelima seksi tersebut diatas dibagi menjadi 11 Sub Seksi/ urusan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 3 urusan, yaitu:
  - a. Urusan Kepegawaian;
  - b. Urusan Keuangan, dan;
  - c. Urusan Umum;
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
  - b. Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian;
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
  - b. Sub Seksi Status Keimigrasian;
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;
  - b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:

- a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, dan:
- b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan berkompeten. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado per tanggal Desember 2022 menunjukkan terdapat 69 pegawai/pejabat termasuk Kepala Kantor, yang tersebar di lima seksi/ sub bagian. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG).

### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menyusun Laporan Kinerja TA. 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

(*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado secara berkelanjutan.

#### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado selaku unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

## E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado selama tahun 2022, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain :

NO	ISU STRATEGIS/ KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
1	Pelayanan public kepada masyarakat di masa Pandemi Covid-19	Menerapkan pelayanan dengan berpedoman pada protocol Kesehatan
2	Kekurangan SDM	Telah membuat ABK dan ANJB yang sudah disampaikan ke Kantor Wilayah dan diteruskan ke Biro Kepegawaian Setjen
3	Belum adanya petugas yang mengikuti diklat/bimtek penyusunan LKJIP	Telah dibuatkan surat usulan mengikuti diklat/bimtek Kantor Wilayah
4	Sarana yang belum memadai	Telah diusulkan pengadaan BMN untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
5	Revisi Anggaran	Dilakukan Revisi Anggaran sesuai dengan skala prioritas agar kegiatan perkantoran tetap berjalan

## F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Sulawesi Utara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil.

Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2021-

2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2021-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasiandan pemasyarakatan

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU).

Sasaran program/IKU Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.



- Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.20 Indeks
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah	Indeks kepuasan internal di wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.417.635.000</b>
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	Rp. 3.417.635.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 8.781.530.000</b>
Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.781.530.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan menghasilkan nilai pencapaian Sasaran Kegiatan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3.61 Indeks	112,8%
	2 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3.72 Indeks	119%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks	3.63 Indeks	116%

Berikut penjelasan capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2022 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulannya. Pelaksanaan survei yang dilakukan ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian terutama pelayanan paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Manado. Walaupun terkendala dengan terjadinya pandemic Covid-19 dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sulawesi Utara, namun pelaksanaan survei ini tetap dilakukan, baik pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun kegiatan eazy passport yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung sehingga terwujudnya optimalisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam memperbaiki kualitas pelayanan paspor kepada masyarakat. Pelaksanaan survei dilakukan melalui smartphone masing-masing pemohon dengan mengakses QR Code survei online yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. QR Code tersebut disediakan dalam bentuk pengumuman cetak kertas yang ditempel pada tempat-tempat strategis yang dapat diakses oleh pemohon. Selain pengumuman cetak kertas, pengumuman juga disebar melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden
Januari	3.86	21
Februari	0	0
Maret	3.93	34
April	3.95	33
Mei	4	32
Juni	3.96	33
Juli	3.96	30
Agustus	3.95	31
September	3.96	28
Oktober	3.94	33
November	3.94	30
Desember	3.95	30

Dari hasil survei yang dilakukan selama 12 bulan terhadap 335 responden didapatkan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,61 dari skala 4, yang berarti sangat baik (A). Dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Informasi Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa informasi pelayanan yang diterima oleh masyarakat melalui media sangat baik. Untuk variabel informasi ini memperoleh nilai A (sangat baik).
- b. Persyaratan Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sangat baik, disampaikan melalui media elektronik maupun nonelektronik. Untuk variabel persyaratan ini memperoleh nilai A (sangat baik).
- c. Prosedur/Alur Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mudah diikuti/dilakukan masyarakat. Untuk variabel prosedur/alur ini memperoleh nilai A (sangat baik).
- d. Waktu Penyelesaian Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan telah sesuai dengan yang ditetapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Untuk variabel waktu penyelesaian ini memperoleh nilai A (sangat baik).
- e. Tarif/Biaya Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan. Untuk variabel tarif/biaya ini memperoleh nilai A (sangat baik).
- f. Sarana Prasarana Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah memberikan kenyamanan/mudah digunakan masyarakat. Untuk variabel sarana prasarana ini memperoleh nilai A (sangat baik).

- g. Respon Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merespon keperluan masyarakat dengan cepat. Untuk variabel respon ini memperoleh nilaiA (sangat baik).
- h. Konsultasi dan Pengaduan Dari hasil survei selama tahun 2022 didapatkan bahwa layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mudah digunakan/diakses masyarakat. Layanan konsultasi dan pengaduan dapat diakses

## 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah melakukan survei integritas internal pegawai. Pelaksanaan survei yang dilakukan ini sangat penting untuk mengetahui penilaian pegawai terhadap integritas organisasi. Pelaksanaan survei dilakukan melalui smartphone masing-masing pegawai dengan mengakses QR Code survei online yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. QR Code tersebut disebar melalui whatsapp grup Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden
Januari	3.94	69
Februari	0	0
Maret	3.93	69
April	3.97	69
Mei	4	69
Juni	3.97	69
Juli	3.99	69
Agustus	4	69
September	3.98	69
Oktober	3.99	69
November	3.97	69
Desember	3.91	69

Hasil ini merupakan hasil penilaian murni dan objektif dari 69 orang internal pegawai terhadap tata kelola organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 69 responden didapatkan nilai Indeks Integritas Internal Organisasi sebesar 3,63 (skala 4) yang berarti sangat baik (A). Dari grafik hasil survei integritas Indeks Anti Korupsi diatas dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas pegawai telah memberikan penilaian SANGAT BAIK.

### 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PW.01.02-002 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberitahuan Nilai Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2022, telah dilaksanakan Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja melalui eSurvey Direktorat Jenderal Imigrasi disampaikan hasil capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) pada Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tahun 2022.

WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	TARGET INDEKS 2022	IPK	% CAPAIAN
KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	67	3,12	3,77	121%
KANWIL KEMENKUMHAM BALI	68	3,12	3,81	122%
KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	65	3,12	3,82	123%
KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	21	3,12	3,72	119%
KANWIL KEMENKUMHAM DJI YOGYAKARTA	43	3,12	3,94	126%
KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	228	3,12	3,70	119%
KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	49	3,12	3,60	115%
KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	44	3,12	3,87	124%
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	223	3,12	3,77	121%
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	208	3,12	3,77	121%
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	217	3,12	3,77	121%
KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	150	3,12	3,72	119%
KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	59	3,12	3,68	118%
KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	40	3,12	3,68	118%
KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	86	3,12	3,78	121%
KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	51	3,12	3,85	124%
KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	237	3,12	3,76	121%
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	60	3,12	3,77	121%
KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	110	3,12	3,59	115%
KANWIL KEMENKUMHAM MALUTU UTARA	36	3,12	3,81	122%
KANWIL KEMENKUMHAM NTB	51	3,12	3,88	124%
KANWIL KEMENKUMHAM NTT	129	3,12	3,56	114%
KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	71	3,12	3,58	115%
KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	44	3,12	3,56	114%
KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	158	3,12	3,75	120%
KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	45	3,12	3,71	119%
KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	102	3,12	3,61	116%
KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	34	3,12	3,77	121%
KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	57	3,12	3,72	119%
KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	129	3,12	3,72	119%
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	44	3,12	3,71	119%

Berdasarkan Tabel Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2022, Wilayah Sulawesi Utara memiliki presentase pengisian pengukuran Indeks Capaian Kinerja melalui esurvey Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 119%, target Index 3,12, Nilai Indeks yang dicapai 3.72 dengan Grade A yang artinya hasil capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian mencapai target.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mendapat dukungan anggaran sejumlah Rp. 12,315,126,000,- hingga 30 Desember 2022 telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp. 11,848,790,494,- atau sebesar 96,21 %. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
<b>Tahun 2021</b>				
Belanja Pegawai	3,940,377,000	3,932,481,410	7,895,590	99,80%
Belanja Barang	5,568,148,000	4,120,568,042	1,447,579,958	74,00%
Belanja Modal	737,000,000	694,880,000	42,120,000	94,28%
Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
<b>Tahun 2022</b>				
Belanja Pegawai	4,134,785,000	4,118,482,314	16,302,686	99,61%
Belanja Barang	6,179,949,000	5,823,330,966	356,618,034	94,23%
Belanja Modal	2,000,392,000	1,906,977,214	93,414,786	95,33%

Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2022 Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum			
	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	3,417,635,000	3,129,000,223	91,55
2	Program Dukungan Manajemen			
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	8,897,491,000	8,719,790,271	98
<b>Total</b>		<b>12,315,126,000</b>	<b>11,848,790,494</b>	<b>96.21</b>

### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

#### 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%
- Data Kontrak, bobot 10 %
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%
- Dispensasi SPM, bobot 10%
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%
- Capaian Output, bobot 25%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	049	013	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	Nilai	100.00	82.07	97.58	96.40	100.00	99.05	100.00	100.00	97.27	100%	97.27
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.21	19.52	9.64	10.00	9.91	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.04		98.61					100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Trivulan I 2022.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun Anggaran 2022 sebesar 97,27.

#### D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

##### 1. E-Performance Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

E-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi eperformance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Adapun capaian eperformance Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

## Capture Capaian E-Performance Tahun 2022

E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 KANTOR IMIGRASI MANADO

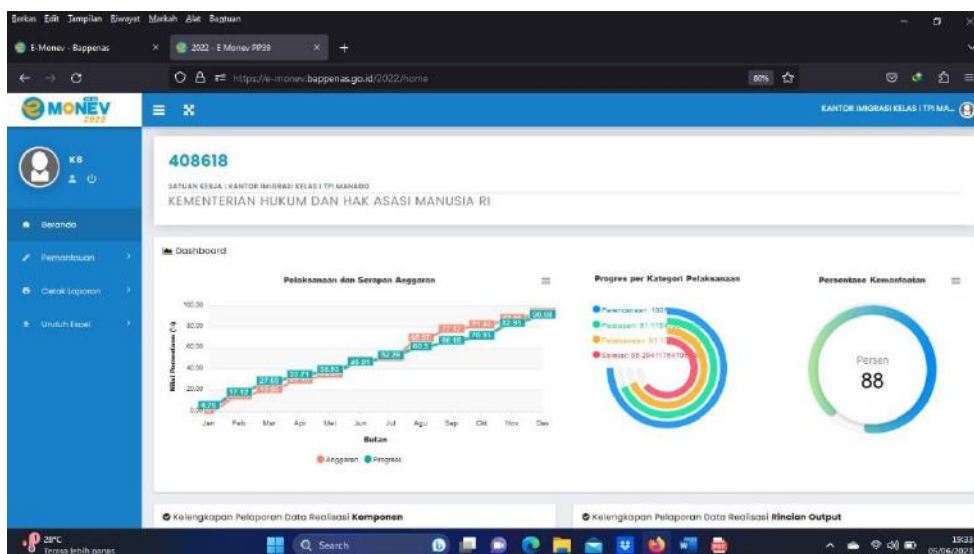
NO	NOMOR	TITIK/ISI	NO	INDIKATOR	UNITAS	INDIKATOR	UNITAS	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE	REMARKS
1			1	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Manado				20.000.000.000	100%	100%	100%
2			1	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Manado				20.000.000.000	100%	100%	100%
3			1	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Manado				20.000.000.000	100%	100%	100%

Legenda: 100% (Hijau), 75% (Kuning), 50% (Merah), 25% (Biru), 0% (Hitam)

## 2. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi eMonev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.

## Capture Aplikasi E-Monev BAPPENAS



Kendala dalam penginputan pada aplikasi e-monev diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman petugas dalam penggunaan aplikasi;
2. Kurangnya kesiapan dalam penyusunan rencana kerja dan ketepatan dalam pelaporan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LKjIP Tahun 2022 Kantor Imigrasi Manado disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2021-2024. Secara umum pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Manado pada tahun 2022 sudah cukup baik,.

Pencapaian ini merupakan hasil dari peran serta seluruh elemen organisasi Kantor Imigrasi Manado yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai sinergitas, kolaborasi, serta kemitraan dengan pihak pengampu kepentingan baik di daerah maupun Kementerian/Lembaga. Dalam pencapaian target kinerja sebagian besar target indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sudah terpenuhi meskipun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal. Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan

tugas di tahun berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 semuanya telah secara maksimal diupayakan, walaupun sepanjang tahun 2022 masih dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat mempengaruhi pola kerja/tugas setiap pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Dalam kondisi pandemi yang membawa banyak ketidakpastian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tetap berupaya untuk tetap produktif dalam berkinerja yang terbukti melalui capaian kinerja tahun 2022.

## B. Saran

Dokumen LKjIP ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKjIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja keimigrasian di daerah. Akhir kata dengan tersusunnya LKjIP Kantor Imigrasi Manado tahun 2022 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta visi dan misi Presiden

Manado, 5 Januari 2023

KEPALA,



Muhammad Akmal

NIP. 196908071992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akmal  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jonny Pesta Simamora  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado , 03 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara

Jonny Pesta Simamora  
NIP. 197312251993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Muhammad Akmal  
NIP. 196908071992031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.417.635.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.417.635.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 8.781.530.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.781.530.000

Manado, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara



Jonny Pesta Simamora  
NIP. 197312251993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado



Muhammad Akmal  
NIP. 196908071992031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akmal

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manado, 03 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Muhammad Akmal  
NIP. 196908071992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Made Nur Hepi Juniarta  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ronald Lumbuun  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara

Ronald Lumbuun  
NIP. 19780906 200312 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

  
Made Nur Hepi Juniarta  
NIP. 19790623 200002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.417.635.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.417.635.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.912.141.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.912.141.000,-

Manado, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara



Ronald Lumbuun  
NIP. 19780906 200312 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado



Made Nur Hepi Juniarta  
NIP. 19790623 200002 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Made Nur Hepi Juniartha

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manado, Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Made Nur Hepi Juniartha

NIP. 19790623 200002 1 001